



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Cot Trieng, Meureudu
Telp / Fax. 0653-51231 Kode Pos 24186

NOTULA/NOTULEN

Rapat : Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya
Hari/Tanggal : Jumat / 10 April 2026
Surat : -
Waktu Rapat : 09. 30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya
Acara : Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya
tentang penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
pada PT. Bank Aceh

Pimpinan Rapat
Ketua Banleg : Nazaruddin Ismail, S.Pd.I, S.H.
Wakil Ket. Banleg : Juraida, S.Pd.
Sekretaris
(Bukan Anggota) : Nasruddin, S.E.,M.M.
Hadir Anggota :
1. Bustami, S.H.
2. Drs. Said Syahrul, S.H.
3. Safrizal
4. Samsul Bahri
5. Faisal
6. M. Lutfi

Tidak Hadir Angg : 1.
2.

Turut Hadir : 1. Asisten I Setdakab
2. Asisten III Setdakab
3. Kepala SKPK terkait
4. Kabag Hukum Setdakab
5. Ka cabang Bank Aceh
6.Tenaga Ahli

Pendamping : 1. Yurliana, S.H,. M.H (Kabag Hukum dan Persidangan)
2. T. Rizal Fakhri, S.Sos.

Pencatat : Elfidar,ST
Nasrul Azwar, S.IP.

Kesimpulan :

Rapat membahas Rancangan Qanun (Raqan) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada PT Bank Aceh Syariah pada tahap pembahasan pertama. Tujuan utama penyertaan modal adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden.

Secara umum disampaikan bahwa:

- Total penyertaan modal sejak 2008 hingga 2025 sekitar Rp17 miliar, dengan deviden yang telah diterima daerah sekitar Rp28 miliar lebih.
- Bank Aceh juga memberikan kontribusi lain seperti CSR dan dana zakat karyawan.
- Pembiayaan yang disalurkan mencakup sektor konsumtif dan produktif.

Dalam pembahasan, beberapa poin penting yang disepakati dan didiskusikan:

1. Bentuk penyertaan modal
Tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi diusulkan juga mencakup barang dan/atau tanah, meskipun masih perlu konsultasi regulasi lebih lanjut.
2. Besaran penyertaan modal
 - Disepakati minimal Rp1 miliar per tahun.
 - Untuk batas maksimal belum ditetapkan (tidak diikat), namun masih akan dikonsultasikan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kemampuan fiskal daerah.
3. Jangka waktu investasi
Direncanakan dalam jangka panjang (sekitar 10–20 tahun), namun fleksibel mengikuti kemampuan keuangan daerah.
4. Perubahan redaksi qanun
 - Penyesuaian istilah dari “daerah” menjadi “kabupaten”.
 - Penyederhanaan isi pasal tanpa rincian detail seperti sebelumnya.
 - Penambahan pasal baru terkait kewajiban dan pertanggungjawaban Bank Aceh.
5. Pertanggungjawaban dan pengawasan
 - Bank Aceh menyampaikan laporan secara berkala (triwulan).
 - Diusulkan penambahan aturan tentang kewajiban Bank Aceh membantu pemerintah daerah.
 - Akan ditambahkan bab khusus tentang pembinaan dan pengawasan, termasuk peran bupati.
6. Isu tambahan yang dibahas
 - Kejelasan pembagian deviden dan kontribusi CSR.
 - Investasi Bank Aceh di luar daerah tetap sesuai regulasi OJK.
 - Perlunya kepastian hukum agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kesimpulan akhir:

- Ragan akan direvisi dengan berbagai masukan yang telah disepakati.
- Beberapa poin krusial (seperti batas maksimal penyertaan modal dan bentuk aset) akan dikonsultasikan lebih lanjut ke tingkat provinsi.
- Pembahasan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya setelah hasil konsultasi diperoleh.

Plt. SEKRETARIS DPRK PIDIE JAYA,

Nasruddin, S.E.,M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197601072001121003

NOTULENSI
RAPAT BADAN LEGISLASI DPRK PIDIE JAYA
COT TRIENG, 10 April 2026

- Nazaruddin** : Assalamu'alaikum Wr. Wb, puji dan syukur kehadiran Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan legislasi. Para Tim pembahas qanun, Pak Asisten, dan Para Kepala SKPK yang hadir di ruang ini. Sebelum kita mulai rapat sama-sama kita bacakan ayat alquran, 'Alfatihah' rapat Terkait dengan draf qanun perubahan qanun penyertaan modal ini rapat dibuka. Mari sama-sama kita bekerja sama melihat kemaslahatan yang baik untuk masyarakat. Kami ada menawarkan program strategis untuk pemerintah. Dalam pembahasan kalau memang ada yang mau ditambahkan dan dikurang tidak ada masalah. Bank aceh sudah berkiprah membantu kabupaten pidie jaya mulai tahun 2016. Nanti Kepala cabang bisa menyampaikan paparan sedikit. Apa saja yang sudah dipersembahkan untuk pidie jaya. CSR dan deviden dan azas manfaat apa yang sudah dirasakan masyarakat pidie jaya. Ini merupakan pembahasan tingkat pertama. Silakan pak asisten sambutanaya
- Asisten I** : (kata sambutan dan penghormatan) sedikit pengantar terkait qanun penyertaan modal. PP nomor ayat 5 (disebutkan tentang pengelolaan daerah) qanun penyertaan modal bertujuan mendorong pertumbuhan umum daerah kecil dan menengah ini menjadi prioritas, meningkatkan pendapat asli daerah melalui deviden. Gambaran umum tentang penyertaan kepada daerah dalam bentuk uang smapai tahun 2025. 1 penyertaan modal sejak tahun 2008 s/d 2025 ada seberar 17 milyar rupiah. 2 dari hasil penyertaan deviden rp. 28.859.343.295 milyar sekian. Alokasi penyertaan modal 10 s/d 20 milyar untuk jangka waktu 20 tahun sebagai jangka inves panjang. Realisasi 1 sampai 2 milyar setiap tahunnya. Raqan penyertaan modal berisiikan 9 bab dan 11 pasal tentunya nantinya setelah pembahasan akan terjadi perubahan.

Tambahan dari pemerintah daerah akan timbul multi player pertumbuhan ekonomi di pidie jaya. Dengan ada tambahan penyertaan modal akan membantu masyarakat.

- Nazaruddin : dapat kita fahami berasama kita juga ingin mendengarkan dari kepala keuangan
- T. Muslem : (kata sambutan dan penghormatan) untuk sementara dari badan keuangan tahun 2026 udah kita alokasikan cuman menunggu regulasi. Kalau bisa di qanun ini ditambah tanah lagi. Kami ada beli tanah untuk bank aceh dan tahun ini kita lunasi mudah dalam laporan kita bisa kita tambah dan lebih banyak modal kita di bank aceh. Syarat kita harus punya sertifikat dulu.
- Nazaruddin : paparan kepada kepala cabang terkait yang disampaikan pak asisten tadi. Apa azas manfaat yang disampaikan oleh asisten.
- Ka Cabang Bank Aceh : (kata-kata sambutan dan penghormatan) penyertaan modal ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. Setiap tahunnya bertambah. 2 tahun terakhir ada masalah dikarenakan keuangan pemda yaitu efisiensi. Dari 17 milyar dapat kami kembalikan kedaerah 28 milyar dan ada juga kegiatan lain dalam bentuk bantuan dan pembagian dari zakat karyawan sebesar 500 juta dan kita masukkan ke rek daerah. Kegiatan yang dapat kami gambarkan ada bantuan CSR kegiatannya kami ambil 2 tahun terakhir. Tahun 2015 rehab konteiner. CSR dapat kami gambarkan sudah ditetapkan dari EUPS. Kegiatan sebesar 77 juta menagadakan pemberian 100 buah kereta sorong untuk gampong-gamong yang terkena banjir. Pembiayaan sampai saat ini Rp 345 milyar dengan alokasi sektor konsumtif. Produktif 43 milyar. Harapan kami kedepan pemda bisa mendukung kegiatan kami. Dana-dana bantuan sudah bibagikan ke bank aceh dan siap kita salurkan.

- Nazaruddin : terkait dengan tanah yang akan kita beli untuk gedung bank aceh apa kita masukkan atau ada aturan lain. Apakah lanjut pembahasan dan dalam pembahasan kita pertanyakan.
- Kabag Hukum : (kata-kata sambutan dan penghormatan) bahwasanya judul kita sepakati waktu di proleg. Ragan ini bukan perubahan tetapi sebagai dasar hukum penyertaan modal bank aceh. Tahun ini qanun ini harus selesai dikarenakan akan mempengaruhi devisa,
- Nazaruddin Ismail : kita mulai dari kosederan menimbang, tidak ada dimasukkan MOU Helsinki ya. Silakan pak rahmad
- Kabag Hukum : dalam kosederan menimbang, dalam qanun lama kita ada memuat. Ada masukkan dari bagian hukum bahwa memuat hal tersebut yang bersinggungan langsung saja.
- Nazaruddin Ismail : konsideran mengingat, ada masukkan silakan
- Kabag Hukum : pak rahmat membacakan kosederan mengingat satu persatu. Point 16 PP nomor 39 tahun 2007 ditukar posisi.
- Nazaruddin Ismail : baik terima kasih, menyangkut tentang pelayanan masyarakat, apakah ada hal-hal yang menyangkut tentang pelayanan.
- Bustami : (kata-kata sambutan dan penghormatan) terkait dengan penyertaan modal apakah secara aturan itu hanya pemerintah daerah secara korporasi atau perorangan apakah bisa. Pernyataan modal apakah uang berputar di daerah atau kembali ke induk. Tahun lalu ada kejadian bank aceh inves diluar aceh itu menjadi pertanyaan
- Nazaruddin Ismail : tambahan pak, terkait 28 milyar berapa persen yang dihargai bank aceh terhadap deviden ke pemerintah. Terkait pengelolaan APBK, bagaimana, estennya. Berapa persen kami ingin tau. CSR bagaimana persentasenya kami mau tau, berapa persen yang dihitung untuk pidie jaya dan kemana saja disalurkan.

- Kepala Bank Aceh : dari pernyataan modal khusus untuk daerah, kebijakan pernyataan modal hanya dari kab atau kota pak, wewenang kami hanya untuk daerah, terakit dengan dinves memang ada pernyataan modal diluar aceh sesuai dengan aturan dari OJK. Dari total 28 milyar deviden hitungannya pertahun pak, perhitungannya modal saham sampai akhir tahun di tambah modal masing-masing. Penempatan dana melaui dinas ditempatkan di giro, langsung amsuk kedalam rek dinas setelah dipotong pajak. Penggunaan kembali ke dinas masing-masing. Jasa giro masuk ke keuangan dan ada PAD. Keuntungan jasa giro 200 sekian. CSR ditetapkan di UUPS pak. Bupati yang menetapkan. Tahun 2025 270 juta. Mtq kita sponsor sift
- Muslem : deviden sudah duluan kita anggarkan. Seandainya tidka kita setor maka kita akan minus.
- Bustami : batas minimum berapa. Oh tidak ada batas
- Tenaga Ahli : terakit bank aceh agak unik. Kalau APBK ada 3 item. Terakit pembagian hasil. Kalau aset pembiayaan kami sudah tau.
- Kepala Bank : tergantung kondisi ekonomi suatu daerah. Kalau kita tetapkan takutnya tidak tercapai. Lebih baik kita mengikuti selama setahun dan kita profosionalkan dengan laba yang kita terima.
- Muslem : ada pengaruh tidak bagi hasil bagi deviden. Ada
- Kepala Bank : senin melakukan UUPS.
- Nazaruddin Ismail : untuk bank aceh nanti setelah jumat jangan ikut kembali.
- Kabag Hukum : Bab I Pasal 1,
Nazaruddin Ismail : point 6 ini jangan kaku apakah ada pendapat lain. Pengertian terkait dengan bupati. Terkait dengan wacana MK. Bagaimana kalau bupati adalah kepala pemerintah

- Kabag Hukum : jika seandainya kedepan terjadi maka akan kita rubah. Point 6 dimerahkan, point 9 akan kita konsultasikan.
- Nazaruddin Ismail : apakah ada yang perlu dipertanyakan silakan.
- Kabag Hukum : Bab II maksud dan tujuan. Pasal 2 ayat 1. Ini merupakan redaksi lama pak.
- Nazaruddin Ismail : dari Bank aceh apakah ada narasi lain.
- Kabag Hukum : ayat 2, ini merupakan redaksi lama
- Kepala Bank : redaksi diganti saja, pembiayaan pak.perkreditan dihilangkan saja. Micro itu kecil 10 juta kebawah.
- Kadis DPMG : micro bagaimana kalau kita ganti menjadi UMKM. Ditambah di point a ayat 2 tambah UMKM
- Kabag Hukum : Bab III penyertaan modal. Bagaimana kalau kita ubah menjadi kabupaten jangan lagi daerah. Judul daerah sedangkan isi kabupaten. Menjadi pernyataan modal pemerintah kabupaten.
- Nazaruddin Ismail : terkait pengadaan tanah sudah ada, kalau barang belum ada. Kalau bisa jangan cuman tanah dan kita tambah lagi dengan barang.
- Kabid Keuangan : setelah kami kaji cuman ada 2 yaitu barang dan tanah. Hanya ada uang dan barang pimpinan.
- Nazaruddin Ismail : kami ingin menjadi multifungsi, ada uang tanah dan gedung. Menjadi catatan untuk konsul. Ayat 3 tambahan : pernyataan modal pemerintah kepada kabupaten kepada PT Bank Aceh Syariah dalam bentuk. Pasal 3 ayat 4 akan kita lanjutkan nanti

=====skor=====

- Nazaruddin Ismail : baik sekor dicabut pembahasan kita lanjutkan. Terkait dengan ragan pernyataan modal pemkab PT Bank Aceh Syariah. Terkait dengan barang belum ada kesepakatan baik bergerak maupun tidak bergerak. Harus ada penjelasan ayat.
- Kabag Hukum : sebelum kami bawa kemari sudah kami ajukan ke bapak Bupati.
- Nazaruddin Ismail : silakan memberi masukan.
- Kabag Hukum : terkait dengan perbandingan Qanun dahulu pasal 3 kami mengurai. Dalam qanun baru ini kami tidak kami rincian lagi langsung sub totalnya saja. Lanjut ayat (4).
- Kabid Keuangan : tujuan kita buat real 1 s/d 2 adalah
- Nazaruddin Ismail : penyerntaan modal pertahun 1 s/d 2 apakah ada tawaran lain
- Bustami : tawaran saya angka maksimal 1 s/d 3. Liquiditas bank aceh apakah rasio siap atau tidak.
- Saed Syahrul : pernyataan modal bisa tidak ternilai. Kita tidak tau kedepan. Menurut saya tidak perlu diikat minimal 1 milyar paling sedikit dan waktu tidak perlu dibatasi.
- Nazaruddin Ismail : ok saya sepakat minimal 1 milyar dan maksimal jangan kita tutup. Angka maksimalnya jangan ada batasi. Pertimbangan kemarin kenapa ada batasan.
- Kabag Hukum : awalnya kita muat 1 milyar jugak. Liat dari fiskal semakin lemah. Terkait dengan tidak ada batasan maksimal kami tidak berani menjamin dari segi peraturan produk hukum. Jangan sampai kasus seperti daerah lain. Terkait batasan maksimal belum bisa kami jawab nanti akan kita konsul dulu.
- Nazaruddin Ismail : tekhnisnya di bank aceh. Bagaimana menurut pandangan dari yang lain

- Muslem : kami hitung dari fiskal pak.
- Asisten : saya sependapat dengan banleg. Angka minimal paling rendah 1 milyar. Angka tertingginya jangan dibatasi. Bats fiskal kemampuan daerah kta pak muslem belum mampu. Seandainya kedepan kita ada kelebihan lain jadi tidak terikat. Misal dipertanian ada perbuk, minimal kita batasi dan maksimal tidak kita batasi.
- Kadis DPMG : kalau tidak mengikat dan minimal saja kita gunakan, prodik 5 tahun karena kepala daerah 5 tahun. Penetapan angka ada qanun sendiri yaitu qanun APBK. Ini merupakan hasil kesepakatan TIM.
- Nazaruddin Ismail : kami tidak berkomitmen di banleg kalau 10 tahun tidak masalah tetapi jangan diikat di angka 2 milyar.
- Kabag Hukum : dari sisi hukum kami menyampaikan ada penyusunan minimal harus ada 3 asas, Hemat kami ketika kita memuat batasan tidak ada kepastian. Pernyataan modal Tirta Krueng Merdu sama juga. Disana kita sebut maksimal.
- ASS III : langsung saja, pihak kami hasil dari evaluasi kemampuan pad anggaran kita rasa-rasanya tidak akan sanggup diatas 2 milyar tadi. Kita buat batas saja dan batasnya kita batasi setelah konsul baru kita masukkan.
- Nazaruddin Ismail : yang lain bagaimana
- Bustami : saya menawarkan ada batas bawah dan atas. Ada deviden. Jadi kita tidak perlu buat qanun tiap tahun.
- M Lutfi : menurut saya tetap batas minimal saja.
- Nazaruddin Ismail : saya minimal 1 m dan batasannya jangan dibatasi. Minimalnya yang penting itu menurut saya sudah ada hukum.

- Kabag Hukum : kita muat tetap 1 m setelah diskusi rengnya 1 s/d 2 m. Ternyata setelah disampaikan dibahas ada masukkan tentunya kami tidak bisa memutuskan sendiri. Terkiat dengan referensi bisa kita sampaikan ke pimpinan.
- Kabid Anggaran : saya jugak tertarik juga apa yang disampaikan banleg. Menurut saya tidak baik saja, kita akan menyampaikan ke atas dulu. Dan saya tertarik bagus menurut saya.
- Muzakir : saya tidak ikut dari awal pak kadis dan pak rahmad yang lebih faham. Angka kepastian hukum itu diangka paling sedikit.
- Nazaruddin Ismail : baik kita merahkan dan konsul. Persoalannya jangan diikat.
- Muslem : ijin ketua, kami setuju pak. Jangan diikat juga boleh.
- Nazaruddin Ismail : baik kesimpulannya tidak kita ikat, dan maksimalnya tidak ada
- Kabag Hukum : huruf a sampai dengan j dihapus isinya diganti (pernyataan modal selanjutnya kepada PT Bank Aceh Syariah dalam bentuk uang, pemerintah kabupaten mengalokasikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tahun 2026.
Pasal 4, pasal 6,
- Nazaruddin Ismail : pasal 6 ayat (1) pertanggungjawaban apakah kita panggil setiap tahun. Bentuk pertanggungjawabannya bagaimana kami mau tau pak. Silakan
- Ka Bank Aceh : dalam laporan publikasi, laporan dalam triwulan.
- Nazaruddin Ismail : draft orang ada kata-kata wajib membantu. Pernyataan modal. Apakah boleh. Baik kalau boleh. Pasal 6, ayat 2 ditambah.
- Kabah Hukum : bisa saja pak ditambahkan dari sisi hukum. Dari tekhnis bagaimana silakan

- Muslem : dari pemegang saham.
- Nazaruddin ismail : menurut saya tidak ada persoalan, ini merupakan pertanggungjawab modal. Tambah ayat saja. Bagaimana kalau kita tambah pertanggungjawaban dan kewajiban di babnya.
- Kabag Hukum : kalau tambah pasal 7 saja. (isinya copas dari Perda banten) yang isinya (PT bank AcehSyariah wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten serta Bab VI, pasal 8,
- Nazaruddin Ismail : bagaimana kalau kita ganti daerah menjadi kabupaten
- Kabah Hukum : baik kita ganti dulu nanti hasil konsultasi di provinsi kita akan tau.
- Nazaruddin ismail : Ada pengurangan ayat dan ada penambahan pasal. Dari 11 pasal menjadi 12 pasal.
- Bustami : bank aceh apakah ada dewan pengawasan
- Kabid Anggaran : mereka ada komisaris. Pasal 11 pengawasan, seorang PPKD harus Bimtek untuk duduk disitu.
- Nazaruddin Ismail : bab pengawasan,
- Bustami : ayat 2 pasal 11, menurut saya pejabat yang ditunjuk itu pengawasan dalam APBK.
- Nazaruddin ismail : diperman bupati sebagai penagawas, apakah bupati wajib dibina tidak.
- Kabag Hukum : kalau menurut saya itu diatur oleh kepala seperti perusahaan.
- Nazaruddin Ismail : bisa tidak kita tambah. Bupati ada pembina tidak di cabang.
- Ka Bank Aceh : bisa pak
- Nazaruddin Ismail : berarti bupati ada hak pembinaan. Bentuk pembinaanya bagaimana pak.

- Ka Bank Aceh : pembinaan untuk pergerakan daerah pak, pergerakan perekonomian
- Nazaruddin Ismail : membacakan perda nomor 12 tahun 2021, tentang pembinaan. Bagaimana kalau kita adopsi saja.
- Kabag Hukum : bagus kalau memang dari sektornya. Bagaimana keuangan
- Kabid Anggaran : cocok kita cocok dengan CSRnya. Tetapi pembinaan utama dari gubernurnya. menurut saya layak memang dimasukkan.
- Nazaruddin Ismail : tambahan Bab menjadi bab IX adopsi dari perda lain bab pembinaan dan pengawasan pasal 5 dan 6.
- Kabag Hukum : bagaimana kalau kita silaturahmi ke profinsi untuk lebih jelasnya. Model DJB dan TBK. Bank sumut masih TBK juga.
- Nazaruddin Ismail : pasal 11 dimerahkana memiliki pemahaman dan pengawasan... totalnya menjadi 14 pasal. Baik sebelum kita tutup closeing dari bapak asisten
- Asisten : baik terima kasih terkait dengan selesainya pembahasan Raqan PT Bank Aceh. Dan saya ucapkan terima kasih
- Nazaruddin Ismail : terima kepada pak asisten, dan saya tutup. Dan akan dilanjutkan sesuai dengan waktu yang ditentukan selanjutnya. **Tokk...**